

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Partai Politik

Peranan Partai Politik dalam Pendidikan Politik di Masyarakat Kabupaten Bantul, artinya berbicara tentang bagaimana peranan atau fungsional atau realita dari partai politik dalam memberikan pendidikan politik ataupun pemahaman politik terhadap masyarakat di kabupaten bantul yang dimana realita yang terjadi masih banyak Golongan Putih (golput) ataupun kurangnya pemahaman arti penting hak politik bagi setiap masyarakat. Partai politik memiliki kewajiban dalam memberikan pemahaman politik demi mewujudkan makna demokrasi yang sesungguhnya.

Partai politik merupakan keharusan dalam kehidupan politik modern yang demokratis. Sebagai suatu organisasi, partai politik secara ideal dimaksudkan untuk mengaktifkan dan memobilisasi rakyat, mewakili kepentingan tertentu, memberikan jalan kompromi bagi pendapat yang saling bersaing, serta menyediakan sarana suksesi kepemimpinan politik secara absah (*legitimate*) dan damai.⁵

Partai politik adalah elemen penting yang juga merupakan salah satu syarat sistem demokrasi dapat dijalankan, partai politik dapat dikatakan sebagai kendaraan politik bagi seseorang untuk mengisi jabatan di pemerintahan melalui

⁵Ichlasul Amal, 1996, *Teory Mutakhir Partai Politik*, Yogyakarta, Tiara Mutiara, hlm. 11.

proses demokrasi. Partai politik juga menghubungkan antara masyarakat dengan lembaga atau pemerintahan.

La Palombara dan Weiner mengidentifikasi empat karakteristik dasar yang menjadi ciri khas organisasi yang dikategorikan sebagai partai politik, adalah sebagai berikut.⁶

1. Organisasi jangka panjang.
Organisasi politik harus bersifat jangka panjang, diharapkan dapat terus hadir meskipun pendirinya sudah tidak ada lagi. Dan ada mekanisme suksesi yang dapat menjamin keberlangsungan partai politik untuk jangka waktu yang lama.
2. Struktur Organisasi.
Partai politik hanya akan dapat menjalankan fungsi politiknya apabila didukung oleh struktur organisasi, mulai dari tingkat local sampai nasional, dan ada pola interaksi yang teratur di antara keduanya sehingga nantinya akan meningkatkan efisiensi serta efektivitas fungsi kontrol dan koordinasi.
3. Tujuan berkuasa.
Partai politik didirikan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan, baik di level lokal maupun nasional ini pula yang membedakan partai politik dengan bentuk kelompok dan grup lain yang terdapat dalam masyarakat seperti perserikatan, asosiasi, dan ikatan.
4. Dukungan publik luas adalah cara untuk mendapatkan kekuasaan. Partai politik perlu mendapatkan dukungan luas dari masyarakat. Semakin besar dukungan publik yang didapatkan oleh suatu partai, semakin besar juga legitimasi yang diperolehnya.

Partai politik adalah organisasi politik yang menjalani ideologi tertentu atau dibentuk dengan tujuan khusus. Bisa juga di definisikan, perkumpulan (segolongan orang-orang) yang seasas, sehaluan, setujuan di bidang politik. Baik yang berdasarkan partai kader atau struktur kepartaian yang dimonopoli oleh sekelompok anggota partai yang terkemuka. Atau bisa juga berdasarkan partai

⁶Firmanzah, 2007, *Marketing Politik - Antara Pemahaman dan Realitas*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, hlm. 67-68.

massa, yaitu partai politik yang mengutamakan kekuatan berdasarkan keunggulan jumlah anggotanya.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), partai politik berarti perkumpulan yang didirikan untuk mewujudkan ideologi politik tertentu. Dalam sejarah Indonesia, keberadaan Partai Politik di Indonesia diawali dengan didirikannya organisasi Boedi Oetomo (BO), pada tahun 1908 di Jakarta oleh Dr. Wahidin Soediro Hoesodo dkk. Walaupun pada waktu itu BO belum bertujuan ke politik murni, tetapi keberadaan BO sudah diakui para peneliti dan pakar sejarah Indonesia sebagai perintis organisasi modern.

Dengan kata lain, BO merupakan cikal bakal dari organisasi massa atau organisasi politik di Indonesia. Pada masa penjajahan Belanda, partai-partai politik tidak dapat hidup tenang. Tiap partai yang bersuara menentang dan bergerak tegas, akan segera dilarang, pemimpinnya ditangkap dan dipenjarakan atau diasingkan. Partai politik yang pertama lahir di Indonesia adalah Indische Partij yang didirikan pada tanggal 25 Desember 1912, di Bandung. Dipimpin oleh Tiga Serangkai, yaitu Dr. Setiabudi, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Ki Hadjar Dewantara. Tujuan partai itu adalah Indonesia lepas dari Belanda. Partai itu hanya berusia 8 bulan karena ketiga pemimpin masing-masing dibuang ke Kupang, Banda, dan Bangka, kemudian diasingkan ke Belanda⁷

⁷https://id.m.wikipedia.org/wiki/Partai_politik?e_pi=7%2CPAGE_ID10%2C3305120500, 5 April 2017, (17.00)

Pengertian Partai Politik, Partai Politik berbeda dengan kelompok kepentingan dan penekan. Ciri paling mendasar yang membedakan partai dengan organisasi lainnya adalah orientasi pada kekuasaan dan penggunaan mekanisme pemilu sebagai cara mencapai kekuasaan.⁸

Artinya disini partai politik lah yang berperan penting dalam sebuah pesta demokrasi yang disebut pemilu tersebut. Tentunya diperlukan partai politik untuk berjalan dengan lancar sistem pemilu tersebut karena kendaraan politik ada dalam partai politik.

Partai Politik setidaknya dapat di definisikan sebagai berikut, yaitu “sebuah organisasi untuk memperjuangkan nilai atau ideologi tertentu melalui penguasaan struktur kekuasaan dan kekuasaan itu diperoleh melalui keikutsertaannya dalam pemilihan umum”⁹

Secara singkat dapat di pahami bahwa partai politik memiliki nilai atau ideologi tertentu disetiap partai yang kemudian diperjuangkan oleh partai tersebut melalui kekuasaannya ketika menang dalam sebuah pemilu

Berikut ini juga beberapa pengertian partai politik yang dikemukakan oleh para ahli dan pakar politik dalam buku Partai Politik di Indonesia, antara lain adalah sebagai berikut:

Robert M. Mac Iver dalam bukunya *Modern State* berpendapat bahwa “Partai politik adalah suatu perkumpulan yang diorganisasi untuk mendukung

⁸Pamungkas, 2012, *Partai Politik Teori dan Praktik di Indonesia*, Yogyakarta, Institute for Democracy and Welfarism (IDW), hlm. 3.

⁹*Ibid.*, hlm. 5.

suatu asas atau kebijaksanaan, yang oleh perkumpulan itu diusahakan dengan sarana konstitusional agar menjadi dasar penentu bagi pemerintahan.”¹⁰

R.H Soltau dalam bukunya *Introduction to Politics* berpendapat bahwa “Partai politik adalah sekelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisasi, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan yang dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih, bertujuan menguasai pemerintah dan melaksanakan kebijaksanaan umum mereka.”¹¹

Menurut Miriam Budiardjo, Partai Politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi nilai-nilai dan cita-cita yang sama, tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan berebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka. Jadi dengan demikian menurut penulis sendiri, partai politik adalah sekelompok orang-orang yang memiliki ideologi yang sama, berniat merebut merebut dan mempertahankan kekuasaan (yang menurut pendapat mereka pribadi paling idealis) dengan tujuan untuk memperjuangkan kebenaran dalam suatu level tingkat negara.¹²

Sedangkan menurut Kitab Suci (Q.S 3 : 104) “Hendaknya ada segolongan umat yang mengajak kepada kebenaran dan menganjurkan kebaikan serta melarang terjadinya dekadensi moral, itulah kelompok elit yang beruntung.” Yang dimaksud dengan segolongan umat adalah kelompok elit politik pemerintahan,

¹⁰ Suprihatini, Amin, 2008, *Partai Politik di Indonesia*, Klaten, Cempaka Putih, hlm.2.

¹¹ *Ibid*

¹² Inu Kencana Syafii, 2013, *Ilmu Pemerintahan*, Bandung, CV. Mandar Maju, hlm. 222.

kemudian mengajak kepada yang benar dan baik maksudnya perlu diseimbangkan antara kebenaran logika ilmu pemerintahan dengan kebaikan etika moral pejabat, sedangkan melarang melakukan tindak kriminalitas memerlukan kekuasaan karena apabila tidak akan di picundangi pihak yang melakukan, untuk itu diperlukan perebutan kekuasaan secara politik sehingga kemudian menguasai militer, kejaksaan, kepolisian dan lain-lain dalam rangka mengantisipasi kejahatan, dan inilah elit power yang beruntung.¹³

Dari beberapa definisi diatas tentang partai politik itu sendiri berarti partai adalah salah satu representatif dari demokrasi yang dimana partai politik sudah sewajarnya membawa kepentingan anggota ataupun masyarakat karena anggota partai politik itu berasal dari sekelompok masyarakat yang memiliki cita-cita yang sama untuk menjaga kesatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mewujudkan nilai demokratis yang mampu membawa kedaulatan negara berada di tangan rakyat.

Demokrasi secara etimologi berasal dari kata "*Demos*" yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan "*Cratein*" yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi *Demos-Cratein* atau demokrasi adalah keadaan negara dimana dalam sistem pemerintahannya, kedaulatannya berada ditangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat.¹⁴

¹³*Ibid*

¹⁴*Ibid.*, Hlm.151.

Untuk mencapai demokrasi itu sendiri diperlukan partai politik yang sehat sesuai dengan definisi diatas, bukan hanya partai politik yang hanya memperjuangkan kepentingan individu saja melainkan harus menjunjung tinggi arti kedaulatan ditangan rakyat.

2. Sistem Kepartaian

Ketika berbicara tentang partai politik yang kita ketahui partai politik merupakan suatu kebutuhan dalam menjalankan suatu pemilihan pemimpin yang demokratis, maka kita tidak lepas dengan suatu yang disebut dengan sistem kepartaian. Apa yang dimaksud dengan sistem kepartaian itu sendiri yakni secara umum sistem partai berarti menjelaskan bagaimana suatu sistem kepartaian dalam suatu pemerintahan.

Sistem kepartaian menurut Maurice Duverger dibagi menjadi tiga kategori yaitu:

1. Sistem Partai Tunggal

Pola partai tunggal terdapat di beberapa negara: Afrika, China, dan Kuba, sedangkan dalam masa jayanya Uni Soviet dan beberapa negara Eropa Timur termasuk dalam ketegori ini. Suasana kepartaian dinamakan non-kompetitif karena semua partai harus menerima pimpinan dari partai yang dominan, dan tidak dibenarkan bersaing dengannya.¹⁵

Artinya dalam sistem kepartaian ini berarti sistem partai tunggal hanya menitikberatkan kepada partai yang dominan, sehingga partai dominan lah yang

¹⁵Miriam Budiarto, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta. Gramedia Pustaka Utama, hlm. 415.

akan berkuasa karena partai yang tidak dominan tidak diperbolehkan bersaing dengan partai dominan.

2. Sistem Dwi-Partai

Dalam kepustakaan ilmu politik pengertian sistem dwi-partai biasanya diartikan bahwa ada dua partai diantara beberapa partai, yang berhasil memenangkan dua tempat teratas dalam pemilihan umum secara bergiliran, dan dengan demikian mempunyai kedudukan dominan. Dewasa ini hanya beberapa negara yang memiliki ciri-ciri sistem dwi-partai, yaitu Inggris, Amerika Serikat, Filipina, Kanada, dan Selandia Baru. Maurice Duverger mengatakan bahwa sistem ini adalah khas *Anglo Saxon*.¹⁶

Dalam sistem kepartaian ini berarti yang dapat berkuasa adalah dua partai yang dominan dan menempati dua tempat teratas. Partai kecil sulit berkembang karena untuk mengalahkan dua partai teratas sangat kecil kemungkinannya. Biasanya partai kecil hanya dijadikan koalisi pada saat tertentu.

3. Sistem Multi-Partai

Pola multi-partai umumnya diperkuat dengan sistem pemilihan Perwakilan Berimbang (*Proportional Representation*) yang memberi kesempatan luas bagi pertumbuhan partai-partai dan golongan-golongan baru. Melalui sistem perwakilan berimbang partai-partai kecil dapat menarik keuntungan dari ketentuan bahwa kelebihan suara yang diperolehnya di suatu daerah pemilihan

¹⁶*Ibid*, hlm.416.

dapat di tarik ke daerah pemilihan lain untuk menggenapkan jumlah suara yang diperlukan guna memenangkan satu kursi.¹⁷

Artinya dalam sistem ini yang juga merupakan sistem yang berlaku di Indonesia sistem ini memberi ruang bagi golongan baru atau partai kecil yang diisi oleh kepentingan sekelompok masyarakat untuk mampu bersaing dan berupaya dalam mengikuti pesta demokrasi. Dalam sistem ini juga biasanya partai kecil dilibatkan untuk selalu berkoalisi dengan partai lainnya untuk memenangkan pemilu.

3. Tipologi Partai Politik

1. Asas dan Orientasi

Berdasarkan asas dan orientasinya, partai politik dibedakan atas tiga jenis, yaitu partai politik pragmatis, partai politik doktriner, dan partai politik kepentingan.¹⁸

a. Partai Politik Pragmatis

Partai politik pragmatis adalah suatu partai yang mempunyai program dan kegiatan yang tidak terikat kaku pada suatu doktrin dan ideologi tertentu. Biasanya, partai pragmatis terdapat dalam sistem dua partai yang berkompetisi secara stabil.

b. Partai Politik Doktriner

Partai politik doktriner adalah partai yang memiliki program dan kegiatan konkret yang berdasarkan pada suatu ideologi tertentu. pergantian pemimpin partai tidak berpengaruh terhadap program dasar partai. Hal ini dikarenakan partai doktriner merupakan suatu bentuk partai yang sudah terorganisir secara ketat.

¹⁷*Ibid*, hlm.420.

¹⁸Ali Safa'at, 2015, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, hlm. 27.

c. Partai Politik Kepentingan

Sesuai dengan namanya, partai politik ini dibentuk atas dasar kepentingan tertentu.

2. Berdasarkan Komposisi dan Fungsi Anggotanya

a. Partai Massa/Lindungan

Partai massa atau partai lingkungan (*patronage*) adalah partai yang mengutamakan dan mengandalkan jumlah anggotanya. Partai ini lebih bersifat egaliter dan merakyat sehingga mudah untuk diterima masyarakat menengah kebawah. Namun, hal ini tidak berarti bahwa partai massaa lebih baik daripada partai kader dalam hal kepedulian terhadap kesejahteraan rayat. Para simpatisan partai ini biasanya bergabung atas dasar kesamaan identitas sosial daripada ideologi atau kebijakan. Biasanya basis partai ini didasarkan pada kelas sosial tertentu.

Menurut Ramlan, ada beberapa kelemahan dalam partai ini, antara lain:

- 1) Longgarnya keterkaitan antar anggotanya karena banyaknya aliran politik yang ada dan menyebabkan ikatan ideologis dalam partai melemah
- 2) Alotnya pembagian kursi jabatan dan perumusan kebijakan karena karakter dan kepentingan setiap kelompok akan sangat menonjol.¹⁹

b. Partai Kader

¹⁹Ramlan Surbakti, 2007, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia Widiasarana Indonesia, hlm. 157.

Partai kader adalah partai yang tidak menekankan jumlah anggotanya tetapi terfokus kepada pembentukan karakter disiplin dan loyalitas anggotanya sehingga menciptakan partai yang solid. Pendidikan kader sangat diutamakan dalam partai ini. Sehingga terhadap calon anggota diadakan saringan dan melalui beberapa tahap seleksi yang ketat. Pemimpin partai biasanya sangat sentralis menjaga keutuhan doktrin politik yang dianut dengan cara mendisiplinkan anggota yang menyimpang dari garis partai.

Karakteristik partai ini menurut Wolinetz adalah:

- a) *Professional leadership groups with high degree of accommodation the lower strata in the party;*
- b) *A lower member;*
- c) *A strong and board-ranging orientation toward voters;*
- d) *Maintanance the structure to guarantee a certain degree of internal democracy;*
- e) *The reliance for financial resources on combination of both public subsidies and the fees and donatiom of member.*²⁰

c. Partai Cath-All

Partai *Cath-All* adalah partai yang ingin menghimpun semaksimal mungkin dukungan dari berbagai macam kalangan masyarakat dan dengan sendirinya menjadi lebih inklusif. Sekilas partai ini serupa dengan partai massa. Perbedaannya adalah jika partai massa mendasarkan diri atas dasar kelas sosial tertentu, partai *Cath-All* mewakili kepentingan bangsa secara keseluruhan. Munculnya partai ini mencerminkan perubahan dalam keadaan politik dan sosial, terutama dengan kemajuan teknologi dan dampak dari televisi. Ciri khas partai

²⁰Steve B. Wolinetz, 2015, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, hlm. 29-30.

ini adalah terorganisasi secara profesional dengan staf yang bekerja penuh waktu.²¹

Orientasi partai ini hanya untuk memenangkan pemilu. Oleh karena itu isu yang disampaikan ketika kampanye kerap kali berubah-ubah sesuai dengan isu-isu yang populer di kalangan pemilih

4. Fungsi dan Tujuan Partai Politik

Sebagai suatu elemen penting dalam pemilihan umum, tentunya munculnya partai politik juga memiliki fungsi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Fungsi dari partai politik tidak hanya sebatas kampanye ataupun mencari banyak masa tanpa memberikan pendidikan yang baik, namun tentunya adanya partai politik pasti memiliki suatu fungsi.

Fungsi partai politik itu sendiri antara lain:

1. Sebagai Sarana Komunikasi Politik

Dalam menjalankan fungsi inilah partai politik sering disebut sebagai perantara (*broker*) dalam suatu bursa ide-ide (*clearing house of ideas*). Kadang-kadang juga dikatakan bahwa partai politik bagi pemerintah bertindak sebagai alat pendengar, sedangkan bagi warga masyarakat sebagai “pengeras suara”.²²

Menurut Muhadam Labolo, partai politik berfungsi menjembatani komunikasi komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat.²³

²¹Miriam Budiarto, *op.cit.* hlm.402.

²²*Ibid*, hlm.406.

²³Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, 2015, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, hlm.23.

Artinya fungsi sarana komunikasi politik adalah dimana partai berfungsi sebagai saran penghubung bagi masyarakat dalam menyampaikan apa yang menjadi kehendak masyarakat terhadap pemerintah. Dengan adanya komunikasi politik ini maka aspirasi masyarakat diharapkan dapat disampaikan lewat partai politik kepada pemerintah.

2. Sebagai Sarana Sosialisasi Politik:

Dalam ilmu politik sosialisasi politik diartikan sebagai suatu proses yang melaluinya seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik, yang umumnya berlaku dalam masyarakat dimana ia berada. Ia adalah bagian dari proses yang menentukan sikap politik seseorang, misalnya mengenai nasionalisme, kelas sosial, suku bangsa, ideologi, hak dan kewajiban.²⁴

Yang dimaksud sosialisasi politik adalah proses pembentukan sikap dan orientasi politik para anggota masyarakat. Melalui proses sosialisasi politik inilah anggota masyarakat memperoleh sikap dan orientasi terhadap kehidupan politik yang berlangsung dalam masyarakat. Dari segi metode penyampaian pesan pesan, sosialisasi politik dibagi dua, yaitu:

a. Pendidikan politik²⁵

Pendidikan politik adalah suatu proses dialog di antara pemberian dan penerimaan pesan. Melalui proses ini para anggota masyarakat mengenal dan mempelajari nilai-nilai, norma-norma, dan simbol-simbol politik pemerintah dan

²⁴Miriam Budiarjo, *op.cit.* hlm.407.

²⁵Ramlan Surbakti,,*op.cit.* hlm.149

partai politik. Pendidikan politik dipandang sebagai proses dialog antara pendididik seperti sekolah, pemerintah dan sebagainya. Melalui kegiatan kursus, latihan kepemimpinan, diskusi , dan keikutsertaan dalam berbagai forum pertemuan.

b. Indoktrinasi politik²⁶

Adalah proses sepihak ketika penguasa memobilisasi dan memanipulasi warga masyarakat untuk menerima nilai, norma , dan simbol yang dianggap pihak yang berkuasa sebagai ideal dan baik. Melalui kegiatan kursus, latihan kepemimpinan, diskusi dan keikutsertaan dalam berbagai forum pertemuan, partai politrek dalam sistem politik demokrasi dapat melaksanakan fungsi pendidikan politik.

Artinya dalam fungsi ini partai politik adalah sarana untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat supaya masyarakat paham tentang fenomena politik dan masyarakat tidak buta akan politik, sehingga masyarakat mampu menentukan hak dan kewajiban mereka sendiri.

3. Sebagai Sarana Rekrutmen Politik

Fungsi ini berkaitan erat dengan masalah sseleksi kepemimpinan, baik internal kepemimpinan partai maupun kepemimpinan nasional yang lebih luas. Untuk kepentingan internalnya, setiap partai butuh kader-kader yang berkualitas, karena hanya dengan kader yang demikian dapat menjadi partai yang mempunyai kesempatan lebih besar untuk mengembangkan diri. Dengan mempunyai kader-

²⁶ *Ibid*

kader yang baik, partai tidak akan sulit menentukan pemimpinnya sendiri dan mempunyai peluang untuk mengajukan calon untuk masuk ke bursa kepemimpinan nasional.²⁷

Menurut Jack C. Plano rekrutmen politik adalah pemilihan orang-orang untuk mengisi peranan dalam sistem sosial. Rekrutmen politik merujuk pada pengisian pada posisi formal dan legal, serta peranan-peranan yang tidak formal. Untuk posisi formal seperti pengisian jabatan preside dan anggota parlemen, sedangkan yang tidak formal adalah perekrutan aktivis dan propaganda.²⁸

Berarti rekrutmen politik menitikberatkan kepada mencari kader yang berkualitas untuk mampu menjadi sosok pemimpin didalam partai maupun sebagai calon yang diajukan sebagai pemimpin di nasional.

4. Sebagai Sarana Pengatur Konflik (*Conflict Management*)

Didalam kehidupan bermasyarakat tentunya masyarakat tak lepas dengan sebuah konflik. Adanya suatu perbedaan ditengah masyarakat mampu menimbulkan konflik dimasyarakat sendiri. Sehingga disini partai politik hadir dengan salah satu fungsi untuk mengatur konflik supaya suatu konflik itu dapat dimanagement kemudian dicari jalan tengah nya.

Disini peran partai politik diperlukan untuk membantu mengatasinya, atau sekurang-kurangnya dapat diatur sedemikian rupa sehingga akibat negatifnya

²⁷*Ibid*, hlm.408.

²⁸Jack C. Plano, 2015, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm.17.

dapat ditekan seminimal mungkin. Elite partai dapat menumbuhkan pengertian diantara mereka dan bersamaan dengan itu juga meyakinkan pendukungnya.²⁹

5. Kontrol Politik

Fungsi partai sebagai agen control politik partai politik berperan untuk menunjukkan kesalahan, kelemahan dan penyimpangan dalam isi kebijakan atau pelaksanaan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Disini partai politik bertugas sebagai pengawas pemerintah dan meninjau jalanya pemerintahan agar tetap berjalan sebagaimana mestinya dan juga membantu menyampaikan aspirasi masyarakat untuk dapat mempengaruhi kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah. Terdapat dua mekanisme dalam menyampaikan sikap kritis terhadap pemerintah³⁰:

1) Pertama sikap kritis yang disalurkan dan di cerminkan oleh wakil-wakil partai politik yang terdapat dalam lembaga legislative. Lembaga legislative ini mempunyai beberapa fungsi, bias sebagai partner pemerintah, dan sekaligus mengusulkan rancangan undang-undang yang akan diimplementasikan pemerintah. Ketika partai politik melihat ketidak beresan dalam situasi dan kondisi social masyarakat, mereka dapat mengusulkan rancangan undang-undang yang dapat mengubahnya . Pada kenyataannya, hal ini tidak mudah dan otomatis dapat dilakukan, mengingat pola pengambilan keputusan yang sangat kompleks dan kerap terjadi negosiasi politik antar fraksi.

²⁹Miriam Budiarjo, *op.cit.* hlm.409.

³⁰http://jeckprodeswijaya.blogspot.co.id/2013/06/fungsi-partai-politik_30.html# ,12 April 2017, (20.00)

2) Kedua, partai politik dapat menyuarakan analisis dan sikap kritisnya melalui jalur non parlementer, misalnya dengan jalan diskusi dan debat public tentang kebijakan pemerintah. Bisa juga dilakukan dialog dengan media massa untuk pembentukan opini public sehingga mendapatkan dukungan politis publik.

Kesimpulanya partai politik berperan sebagai wakil dari masyarakat untuk mengawasi jalanya pemerintahan agar tetap berjalan dengan baik dan sebagaimana mestinya, juga berperan dalam penyalur aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada pemerintah untuk bias mempengaruhi kebijakan yang akan diambil pemerintah benar-benar sesuai dan sejalan dengan keinginan rakyat. Akan tetapi masih bias kita lihat bahwa fungsi partai politik sebagai sarana memperjuangkan kepentingan politik, dalam hal ini dipergunakan sebagai jembatan untuk menyalurkan kepentingan-kepentingan politik individu. Negara Indonesia sekarang menganut sistem multipartai, dengan adanya sistem tersebut maka sistem pemerintahan yang berkuasa adalah pemerintah yang berdasarkan koalisi beberapa partai karena sulitnya mencari partai yang memiliki suara mayoritas. Fungsi dan kedudukan pemerintah dalam kedudukan system kepartaian Indonesia sudah banyak berubah sejak adanya reformasi di Indonesia. Pada mulanya Indonesia menganut sistem demokrasi terpimpin, pemerintah berfungsi sebagai “pengayom” semua partai yang ada dalam artian pemerintah yang mengatur keberadaan partai tersebut dan partai yang ada pun sudah di tentukan 2 yang mengakomodir golongan keagamaan yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan(PDIP), sedangkan masyarakat

yang tidak masuk kedua partai itu masuk ke dalam Golongan Karya (GOLKAR). Partai dalam hal ini mendukung semua kebijaksanaan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang sesuai dengan Repelita. Semenjak adanya kebebasan berserikat dan berpolitik, banyak partai-partai baru yang bermunculan hal ini juga sedikit banyak mengubah kedudukan dan fungsi dari negara. Dengan adanya banyak partai pemerintah yang terbentuk karena koalisi tidak bias sepenuhnya menjadi “pengayom” yang netral bagi partai-partai. Disisi lain pemerintah haruslah bersikap netral sebagai Pembina dari semua partai yang ada. Namun disisi lain hal ini sulit dilakukan karena banyaknya kepentingan yang bermain. Dalam hal ini hubungan pemerintah dengan partai politik menjadi hubungan timbale balik dan saling membutuhkan.

Secara ringkas dapat disimpulkan bahwa dengan kondisi system kepartaian Indonesia saat ini pemerintah tidak bias sepenuhnya menjadi pengayom semua partai politik karena banyak partai di Indonesia sehingga sulit untuk mendapatkan suara mayoritas sehingga sulit untuk mencapai kenetralan pemerintah terhadap partai-partai politik karena saling membutuhkan disisi lain hal ini akan menimbulkan kesulitan bagi pemerintah saat tumbuhnya berbagai kepentingan individu. Karena pemerintah membutuhkan koalisi dari partai-partai politik tersebut.

Kemudian selain fungsi Partai Politik juga memiliki beberapa tujuan yang diantaranya telah diamanahkan dalam Undang-Undang antara lain:

Dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dalam Bab V Pasal 10 tentang tujuan dan fungsi, parpol memiliki tujuan sebagai berikut:

(1) Tujuan umum Partai Politik adalah:

- a. Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- d. Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

(2) Tujuan khusus Partai Politik adalah:

- a. Meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan;
- b. Memperjuangkan cita-cita Partai Politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
- c. Membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan ber masyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Sudah jelas diamanahkan dalam undang-undang bahwa parpol memiliki tujuan-tujuan yang mulia untuk memperjuangkan kedaulatan rakyat serta untuk mewujudkan demokrasi dan persatuan negara kita. Tujuan dan fungsi tersebut diatas tentunya harus mampu di implementasikan dengan baik di dalam kehidupan

bermasyarakat. Sehingga apabila tujuan dan fungsi partai politik yang sesungguhnya tersebut dapat dilaksanakan maka kemungkinan dapat tercipta partai politik yang sehat tanpa ada kepentingan individu melainkan kepentingan masyarakat atau kelompok yang akan diperjuangkan oleh partai politik.

5. Pendidikan Politik

Menurut Alfian, mengidentifikasi pendidikan politik dalam arti kata yang longgar yaitu sosialisasi politik adalah bagian langsung dari kehidupan masyarakat sehari-hari. Disenangi atau tidak, diketahui atau tidak, disadari atau tidak, hal itu dialami oleh anggota-anggota masyarakat, baik penguasa ataupun orang awam. Jadi kalau boleh disimpulkan, pendidikan politik (dalam arti kata yang ketat) dapat diartikan usaha yang sadar untuk mengubah proses sosialisasi masyarakat sehingga mereka memahami dan menghayati betul nilai-nilai politik yang terkandung dalam suatu sistem politik yang ideal yang hendak dibangun. Hasil penghayatan itu akan menghasilkan/melahirkan sikap dan tingkah laku politik baru yang mendukung sistem politik yang ideal itu, dan bersamaan dengan itu lahir pula kebudayaan politik baru.³¹

Berarti pendidikan politik yakni suatu usaha dari setiap kelompok-kelompok masyarakat atau partai politik dalam memberikan pemahaman tentang politik yang kemudian dengan masyarakat yang paham politik tersebut mampu berkontribusi dalam proses politik di Indonesia.

³¹Alfian,1990, *Masalah dan Prospek Pembangunan Politik di Indonesia, Kumpulan Karangan*,Jakarta, PT. Gramedia,hlm.245-246.

Bentuk dan proses sosialisasi atau pendidikan politik menurut Dannis Kavang, itu terbagi atas dua jenis, yaitu³²:

(a) Bentuk dan proses yang bersifat laten atau tersembunyi dimana kegiatan atau aktivitasnya berlangsung dalam lembaga-lembaga sosial non politis seperti lingkungan keluarga, lingkungan social dan keagamaan, lingkungan kerja maupun lingkungan sekolah atau kampus.

(b) Bentuk dan proses yang bersifat terbuka di mana aktivitasnya berlangsung dalam lembaga politis tertentu (termasuk pemilu dan perangkat-perangkatnya).

Ramlan Surbakti berpendapat bahwa sosialisasi politik dibagi dua yaitu pendidikan politik dan indoktrinasi politik. Pendidikan politik merupakan suatu proses dialogik diantara pemberi dan penerima pesan. Melalui proses ini para anggota masyarakat mengenal dan mempelajari nilai-nilai, norma-norma, dan simbol-simbol politik negaranya dari berbagai pihak dalam sistem politik seperti sekolah, pemerintah, dan partai politik.³³

Pendidikan Politik menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, Pasal 1 ayat (4), "Pendidikan Politik proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara." Artinya partai politik memiliki tugas untuk memberikan

³²DannisKavang, 1998, *Political Culture*. Bandung, Armico, hlm. 45.

³³Ramlan Surbakti, 1992, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia Widya Pustaka Utama, hlm.117.

pemahaman tentang politik dengan pendidikan politik yang menjadi salah satu fungsi partai politik, sehingga masyarakat mampu memahami hak-hak politik mereka.

Menurut Rusadi Kantaprawira³⁴, pendidikan politik yaitu untuk meningkatkan pengetahuan rakyat agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politiknya. Sesuai paham kedaulatan rakyat atau demokrasi, rakyat harus mampu menjalankan tugas partisipasi. Bentuk-bentuk pendidikan politik dapat dilakukan melalui:

- a) Bahan bacaan seperti surat kabar, majalah, dan lain-lain bentuk publikasi massa yang biasa membentuk pendapat umum
- b) Siaran radio dan televisi serta film (audio visual media).
- c) Lembaga atau asosiasi dalam masyarakat seperti masjid atau gereja tempat menyampaikan khotbah, dan juga lembaga pendidikan formal ataupun iniformal.

Partai politik memiliki hubungan dalam pendidikan politik sebagai berikut.³⁵

- a. Partai politik memiliki peran penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

³⁴Kantaprawira Rusadi, 2004, *Sistem Politik Indonesia*, Suatu Model Pengantar, Edisi Revisi, Bandung, Sinar baru Algensindo, hlm. 55.

³⁵<http://revolusizaman.blog.ums.ac.id/fungsi-vital-partai-politik-dalam-pendidikan-politik/>, 12 April 2017, (20.00)

Melalui partai politik para pemimpin dan wakil rakyat di Negara kita terpilih. Namun peran penting tersebut tidak disertai oleh pelaksanaan fungsi partai politik sebagai *Instrumen of Political Education* dengan baik dan benar terutama terhadap kadernya. Hal ini karena pelaksanaan pendidikan politik oleh partai politik sering terkendala dengan masalah dana. Dengan adanya hambatan tersebut, maka persepsi tentang bentuk pendidikan politik itu sendiri harus dirubah. Pelaksanaan pendidikan politik tidak hanya dapat dilakukan melalui bentuk formal tetapi juga dalam bentuk non formal.

b. Pendidikan kewarganegaraan adalah wahana pendidikan.

Dalam arti pengetahuan, pendidikan kewarganegaraan memiliki (*body of knowledge*) kestrukturatan pengetahuan. Sebagai proses pendidikan, pendidikan kewarganegaraan berusaha untuk mengembangkan political awareness, political behavior, dan political attitude yang dikemas di dalam satu proses pendidikan yang kita sering sebut *civic competence*. Jembatan antara partai politik dengan pendidikan kewarganegaraan adalah untuk mendidik warga negara agar memiliki kompetensi kewarganegaraan (*civic competence*). Memang partai politik tidak menjalankan pendidikan kewarganegaraan dalam arti formal, tetapi dia dapat menjalankan pendidikan kewarganegaraan dalam arti non formal. Partai politik dapat berperan seperti halnya pendidikan kewarganegaraan mempunyai peran yaitu sebagai sumber-sumber inspirasi akademik, sebagai sarana pendidikan, sebagai sarana perubahan perilaku, dan sebagai sarana habituasi untuk

membangun kebiasaan politik. Dengan muatan tersebut maka diharapkan partai politik dapat berjalan beriringan dengan pendidikan kewarganegaraan untuk berperan baik di dalam mencapai tujuan bangsa dan negara.

Pendidikan politik juga merupakan kewajiban bagi setiap partai politik seperti yang terdapat dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik pasal 13 huruf e yang dimana partai politik berkewajiban melakukan pendidikan politik dan menyalurkan aspirasi politik anggotanya. Dengan demikian, setiap warga berhak untuk memperoleh pendidikan politik dari partai politik.

Pendidikan politik sering disebut dengan istilah *political forming* atau *politische bildung*. Disebut “*forming*” karena terkandung intensi membentuk insan politik yang menyadari kedudukan politiknya di tengah masyarakat. Dan disebut “*bildung*” (pembentukan atau, pendidikan diri sendiri), karena istilah tersebut mengandung pengertian pembentukan diri sendiri dengan kesadaran dan tanggung jawab sendiri untuk menjadi insan politik.³⁶

Giesecke (ahli didaktik, pendidik dan politikus Jerman), mendefinisikan pendidikan politik sebagaiberikut³⁷:

1. *Bildungswissen*

³⁶Kartini Kartono, 2009, *Pendidikan Politik Sebagai Bagian Dari PendidikanOrangDewasa*, Bandung , Mandar Maju, hlm. 13.

³⁷*Ibid*, hlm. 30.

Yang artinya yaitu, bisa mengetahui bentuk dan gambaran dari manusia (*mensbeeld*) serta perkembangannya, dan gambaran kebudayaan bangsa sendiri, sehingga orang sadar akan identitas sendiri, memiliki kepercayaan sendiri yang kuat dan sanggup menghapus kompleks rasa rendah diri serta rasa dependensi pada kekuatan atau bangsa lain, dan memahami benar kekuatan bangsa sendiri, pandangan hidup dan filsafat hidup bangsa (dalam hal ini Pancasila) yang dipakai sebagai patokan perjuangan untuk mencapai sasaran hidup berbangsa, yaitu hidup sejahtera;

2. *Orientierungswissen*

Yaitu mampu berorientasi pada paham-paham kemanusiaan yang bisa memberikan kebahagiaan, keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan pada setiap warga negara dan umat manusia. Secara obyektif orang harus berani melihat realitas nyata, dan mau mengadakan orientasi ulang terhadap situasi kondisi politik yang belum mantap, khususnya mengoreksi kelemahan noda dan unsur destruktif lainnya. Sehingga bisa ditemukan alternatif penyelesaian yang baik, dan orang bisa keluar dari macam-macam jalan buntu/*impasse*, menuju keseimbangan dan keserasian hidup bersama;

3. *Verhaltungswissen*

Yaitu menunjuk pada perilaku yaitu memahami hukum, norma, tata tertib, dan peraturan yang menuntun semua tingkah laku politik. Sehingga subyek menjadi lebih cermat dan lebih bijaksana menanggapi situasi politik sesaat. Caranya ialah dengan jalan mampu mengendalikan tingkah laku diri sendiri atas

pertimbangan hati nurani sehingga orang menjadi tidak salah tingkah dan tidak egoistis-egosentris, dan mau menjunjung tinggi prinsip kesusilaan;

4. *Aktionwissen*

Artinya mampu bertingkah laku tepat, cermat, dan benar, karena didukung oleh prinsip kebenaran dan keadilan, disertai refleksi objektif, dan wawasan kritis. Prinsip kebenaran dan keadilan harus bersifat universal. Refleksi mengandung kesanggupan mempertimbangkan baik-baik, dan mampu melakukan pencerminan kembali peristiwa-peristiwa politik, hingga terjadi pewawasan reflektif, serta membuahkan ide-ide dan aksi/tindakan yang tepat untuk mengatasi semua kesulitan.

Kemudian dijelaskan secara detail dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik BAB XIII tentang Pendidikan Politik pasal 31 sebagai berikut:

- (1) Partai Politik melakukan pendidikan politik bagi masyarakat sesuai dengan ruang lingkup tanggung jawabnya dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender dengan tujuan antara lain:
 - a. meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupanbermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
 - b. meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupanbermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
 - c. meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsadalama rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

(2) Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila.

Dari pasal tersebut diatas dapat dilihat betapa pentingnya pendidikan politik yang harus diberikan oleh partai politik kepada masyarakat. Kesadaran hak dan kewajiban masyarakat akan politik seharusnya mulai diperbaiki dengan pendidikan politik yang sehat. Dengan pendidikan politik juga diharapkan partisipasi politik masyarakat mampu bertambah. Dengan pendidikan politik yang sehat sesuai dengan amanat undang-undang tersebut indonesia akan memiliki karakter bangsa yang demokratis dan budaya politik yang sesuai dengan pancasila dengan tujuan untuk persatuan dan kesatuan bangsa.

Proses sosialisasi politik berjalan seumur hidup, terutama dalam masa kanak-kanak. Ia berkembang melalui keluarga, sekolah, peer group, tempat kerja, pengalaman sebagai orang dewasa, organisasi keagamaan, dan partai politik. Ia juga menjadi penghubung yang mensosialisasikan nilai-nilai politik generasi yang satu ke generasi yang lain. Disinilah letaknya partai politik dalam memainkan peran sebagai sarana sosialisasi politik. Pelaksanaan fungsi sosialisasinya dilakukan melalui berbagai cara yaitu media massa, ceramah-ceramah, penerangan, kursus kader, penataran, dan sebagainya.³⁸

Artinya dalam melakukan pendidikan politik berbagai macam cara dapat dilakukan demi mewujudkan pendidikan politik yang ideal. Seperti menurut Prof. Miriam Budiardjo diatas ada beberapa fungsi partai politik yang diantaranya

³⁸Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, op.cit. hlm.407.

adalah partai politik sebagai sarana sosialisasi politik. Dengan fungsi sosialisasi politik ini pendidikan politik terhadap masyarakat dapat dilakukan. Partai politik harus melakukan sosialisasi politik mengenai hak dan kewajiban serta pengetahuan politik terhadap masyarakat yang nantinya tujuan utama dari pendidikan politik dapat terpenuhi.

Berdasarkan hal diatas tentunya banyak sarana yang mampu dan seharusnya dapat dilakukan oleh partai politik guna menjalankan amanah undang-undang untuk melakukan pendidikan politik yang sudah menjadi suatu kewajiban bagi setiap partai politik terhadap masyarakat.

Pendidikan politik ini juga memiliki tujuan-tujuan tertentu yang diantaranya menurut menurut Kartini Kartano adalah³⁹ :

- a. Membuat rakyat (individu, kelompok, klien, anak didik, warga masyarakat, rakyat) :
 1. Mampu memahami situasi sosial-politik penuh konflik.
 2. Berani bersikap tegas, memberikan kritik, serta membangun terhadap kondisi masyarakat yang tidak sesuai.
 3. Aktivasnya diarah pada proses demokratisasi semua lembaga kemasyarakatan serta lembaga Negara.
 4. Sanggup memperjuangkan kepentingan dan ideologi tertentu, khususnya yang berkolerasi dengan keamanan dan kesejahteraan hidup bersama.
- b. Memperhatikan dan mengupayakan terbagi atas :
 1. Peranan insane dalam setiap individu sebagai warga Negara (melaksanakan realisasi diri atau aktualisasi diri dari dimensi sosial).
 2. Mengembangkan semua bakat dan kemampuannya.
 3. Agar orang bisa aktif dalam proses politik demi membangun diri dan masyarakat sekitar, bangsa dan Negara.

³⁹Kartini Kartono, 2009, *Pendidikan Politik Sebagai Bagian Dari PendidikanOrangDewasa*, *op.cit.* hlm. 62.

Menurut Surono sebagaimana dikutip Ramdlang Naning, Pendidikan politik adalah usaha untuk masyarakat politik, dalam arti mencerdaskan kehidupan politik rakyat, meningkatkan kesadaran warga terhadap kepekaan dan kesadaran hak, kewajiban dan tanggung jawab terhadap bangsa dan negara.⁴⁰

Secara umum Pendidikan Politik dapat diartikan suatu usaha yang dilakukan oleh partai politik kepada masyarakat yang bertujuan memberikan pendidikan ataupun pemahaman tentang politik atau pemahaman hak dan kewajiban politik masyarakat di Indonesia. Pendidikan politik merupakan salah satu yang wajib diberikan oleh partai politik kepada masyarakat. Pendidikan politik juga merupakan salah satu fungsi partai politik yang harus diwujudkan dalam masyarakat dengan tujuan utamanya untuk mewujudkan negara Indonesia yang demokratis dengan masyarakat yang tidak mudah untuk di intervensi oleh pihak manapun.

⁴⁰Ramdlang Naning, 1982, *Pendidikan Politik dan Regeneras*, Jakarta, Liberty, hlm. 8.